

FILANTROPI MODERN UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL

Chusnan Jusuf

ABSTRAK

Makna Filantropi tradisional yang dikenal dengan sikap kedermawanan karitas (belas kasihan) sudah mulai dikembangkan dan ditafsir ulang pengertiannya dimana makna Filantropi Modern lebih diartikan dengan kedermawanan untuk melakukan perubahan dan keadilan sosial secara struktural berkaitan dengan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, gender, lingkungan hidup dan masalah sosial-budaya dalam arti luas. Karena kedekatannya makna asli filantropi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial maka dalam kajian ini Filantropi Modern dikaitkan relevansinya dengan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hukum, gender, dsb. Yang ditampilkan sebagai contoh Filantropi Modern di Indonesia ada 4 (empat) yayasan dengan pertimbangan metodologis, yaitu dengan kriteria yayasan yang berbasis Indonesia dengan sumber dana dalam negeri atau sumber dana luar negeri tapi dikelola sepenuhnya oleh putra/putri Indonesia. Atas dasar pertimbangan metodologis seperti tersebut maka diperoleh 4 yayasan Filantropi Indonesia, yaitu; Dompot Dhu'afa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yappika dan Yayasan Tifa. Analisa sejarah pertumbuhan dan perkembangan gerakan Filantropi di Indonesia dari kebiasaan tradisional pengumpulan dari cara warung padang hingga cara-cara yang lebih "professional" di hotel sebagai bentuk filantropi amal. Filantropi tradisional yang membudaya di Indonesia bersumber dari Agama baik Kristen maupun Islam dengan spirit keagamaan. Seiring dengan perkembangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada dekade 70-an maka perkembangan Filantropi tradisional yang bercirikan pelayanan amal berkembang secara lebih luas menangani masalah-masalah kemiskinan, perburuhan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, demokratisasi, ketunaan sosial, narkoba, dan HIV/AIDS. Filantropi modern membawakan suara organisasi masyarakat sipil yang tidak hanya menyediakan pelayanan, tetapi juga advokasi. Dari sinilah diperoleh contoh gerakan Filantropi modern di Indonesia dengan 4 (empat) kualifikasi tersebut.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide tentang Filantropi (Modern) menjadi wacana serius seiring dengan mengemukanya konsep *Civil Society*, karena kemunculannya terutama berkaitan dengan topik kemandirian *Civil Society*. Kebutuhan kemandirian *Civil Society* ini sesuai dengan perannya untuk membatasi pemerintahan yang otoriter, meningkatkan keberdayaan masyarakat, mengurangi dampak negatif dari kekuatan pasar dan menuntut akuntabilitas publik serta meningkatkan mutu dan sifat inklusif dari tata pemerintahan.

Istilah Filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *Philos* (berarti Cinta), dan *Anthropos* (berarti Manusia), sehingga secara harfiah Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*)

dan asosiasi (*Association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Meski berbeda dalam konsep maupun prakteknya, tradisi filantropi sudah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah.

Secara umum Filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya, dikenal dua bentuk Filantropi, yaitu Filantropi Tradisional dan Filantropi Modern. Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang berbasis Karitas (*Charity*) atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-

lain. Dengan demikian, bila dilihat dari orientasinya maka Filantropi Tradisional lebih bersifat Individual. Dengan orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan *prestise* mereka di mata publik. Model Karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro Filantropi Tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan, akibat dari ketidakadilan struktur.

Berbeda dengan Filantropi Tradisional, Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.

Dalam konsep Filantropi Keadilan Sosial yang diusahakan melalui pembangunan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Filantropi modern diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas (bahkan untuk kasus di Indonesia yang lemah dan mayoritas).

Substansi Filantropi Modern, terlihat jelas pada Orientasinya, pada perubahan institusional dan sistematis. Dalam konsep ini, Filantropi Modern, sumber daya yang dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial dengan metode utamanya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi seperti ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*Social Movement Organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil.

B. Pokok Permasalahan

Salah satu cara pengukuran *mainstream* Filantropi, apakah berorientasi kepada karitas atau kepada pembangunan untuk keadilan sosial adalah dengan melihat pada aspek distribusinya.

Dari gambaran yang diperoleh memunculkan pertanyaan bagaimana pola dan orientasi penyaluran dana-dana Filantropi untuk kasus Indonesia.

C. Manfaat Kajian

Manakala kajian ini dapat secara jernih mengurai problematika Filantropi Modern bagi pembangunan sosial di Indonesia, sedikit banyak telah memberikan sumbangsih pemikiran bagi tumbuh kembangnya raksasa modal sosial yang masih tertidur nyenyak dalam lipatan buku-buku di perpustakaan.

D. Fokus Kajian dan Metodologi

Fokus kajian adalah profil organisasi yang dapat dikategorikan Organisasi Filantropi Modern di Indonesia dengan motivasi yang bermacam-macam seperti motivasi keagamaan ataupun humanisme.

Ada tiga kriteria pemilihan organisasi Filantropi modern yang diambil dari beberapa organisasi yang dijumpai dalam khazanah kepustakaan. Ketiga kriteria tersebut adalah; (1) Organisasi swasta nirlaba dan berbasis di Indonesia. (2) Mendanai (sebagian) aktivitas Filantropinya untuk pembangunan sosial. (3) Didanai sumber dalam negeri atau didanai dari bantuan luar tetapi dijalankan sepenuhnya oleh yayasan Indonesia.

Dari fokus kajian dan kriteria metodologis tersebut maka dipilih empat (4) yayasan/ organisasi dari Filantropi modern di Indonesia sebagai contoh *referensial*.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN ANALISA

A. Filantropi di Indonesia

Kegiatan sejumlah lembaga Filantropi modern yang umum dikenal dari Amerika itu dapat disaksikan di seluruh belahan dunia. Di antaranya yang sempat terkenal di Indonesia adalah *Ford Foundation* dan *Rackefeller Foundation*. Keduanya telah berdiri, hidup dan aktif lebih dari satu abad lamanya. Meski mempertahankan nama keluarga lembaga derma sejenis ini praktis tidak lagi berkaitan dengan para ahli waris pendirinya. Donasi mereka menjadi abadi dan merupakan *public trust*. Yang menarik adalah kenyataan bahwa spirit Filantropi ini terus tumbuh dan

berkembang. Kini ribuan lembaga *grant making* seperti itu, besar atau kecil hidup di negeri paman sam yang kiprahnya banyak dinikmati oleh masyarakat termasuk mahasiswa Indonesia.

Bila ditelusuri sejarah Filantropi di Indonesia, berawal dari unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari agama baik Kristen maupun Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan kegiatan *misionaris*¹ dan dakwah. Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (panti-panti sosial).

Muhammadiyah yang saya ketahui merupakan organisasi masyarakat Islam yang didirikan tahun 1912, merupakan salah satu contoh organisasi agama yang menyediakan pelayanan sosial. Kini Muhammadiyah mengelola puluhan ribu lembaga pendidikan tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi, ratusan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan ribuan panti sosial yang tersebar di seluruh wilayah nusantara². Ini adalah contoh tradisi tua dari Filantropi berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan sosial di Indonesia. Muhammadiyah mencontohkan cara gerakan Misionaris Kristen yang telah dipraktikkan lebih dari setengah abad sebelum Muhammadiyah berdiri.

Arus kedua gerakan Filantropi di Indonesia, adalah kemunculan dan perkembangan organisasi masyarakat sipil yang lebih populer dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya sebagai tanggapan terhadap modernisasi. Masalah sosial baru yang ditimbulkan proses modernisasi menuntut pendekatan yang lain dari pendekatan Filantropi Tradisional. Untuk menangani masalah-masalah baru ini kemiskinan, perburuhan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, *demokratisasi*, ketunaan sosial, narkoba, HIV/Aids organisasi masyarakat sipil menawarkan tidak hanya melalui penyediaan pelayanan tetapi juga *advokasi*. Organisasi Masyarakat Sipil tidak selalu bergerak di bidang Filantropi dan tidak selalu didukung masyarakat akar rumput seperti organisasi keagamaannya. Namun kegiatan mereka lebih mendesakkan perubahan yang lebih nyata dan menunjukkan adanya kebutuhan untuk bertindak dengan cara

lain. Gagasan tentang partisipasi dan pemberdayaan rakyat, tentang advokasi, kebebasan dan hak asasi, semuanya bergolak dibawah tekanan rezim Soeharto. Hal-hal seperti ini mewarnai perkembangan Filantropi Modern di Indonesia pada dasawarsa 1990-an.

Awal dasawarsa 1990-an juga menyaksikan kemunculan organisasi Filantropi perusahaan. Perkembangn ini didasari lebih jauh oleh krisis ekonomi Asia yang telah menumbangkan rezim Soeharto pada 1997. Krisis ini telah memicu semangat Filantropi baru dengan menciptakan "momentum bagi suatu masyarakat yang telah lama memiliki tradisi derma untuk meninggalkan kebiasaan pemberian spontan dan melakukan usaha-usaha jangka panjang untuk membantu masyarakat membantu diri mereka sendiri"³.

Zaman reformasi era sesudah Soeharto, adalah era kebangkitan organisasi masyarakat sipil. Krisis ekonomi dan runtuhnya *rezim otoriter* juga telah memperbesar peran masyarakat sipil dan masyarakat luas fungsi-fungsi mereka sampai wilayah isu-isu yang telah memanas pada masa rezim tersebut⁴.

Pada tahun 2003 ada lebih kurang 30 yayasan usaha yang beroperasi di Indonesia, dan beberapa diantaranya dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dengan beberapa kriteria, yaitu; (a) Organisasi swasta nirlaba dan berbasis di Indonesia dengan sumber dana dalam negeri; (b) Organisasi swasta nirlaba yang mendanai Filantropi modern untuk pembangunan sosial secara umum; (c) Organisasi swasta nirlaba dalam negeri dengan dana (sebagian atau seluruhnya) dari luar, tetapi sepenuhnya diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia (dalam negeri).

Yayasan Filantropi modern tersebut adalah:

1. Dompot Dhu'afa (DD) Republika adalah sebuah potret lembaga pengelola Filantropi Islam modern di Indonesia. Pengalamannya dalam mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf menurut prinsip-prinsip manajemen modern mampu mengisi kekosongan model pengelolaan Filantropi modern di kalangan umat Islam Indonesia dewasa ini⁵. Dalam hal penggalangan dana saat ini DD mampu

“menyaingi” lembaga amil pemerintah yang telah lebih dahulu hadir seperti BAZIS DKI Jakarta yang didirikan tahun 1968. padahal di awal berdirinya DD banyak berguru kepada lembaga ini. Namun dengan pengelolaan manajemen yang lebih baik, DD bahkan kini mampu “menyalip” dan dikenal sebagai lembaga amil yang paling berhasil⁶.

2. Pos Keadilan Peduli Umat. Lahir dari rahim sebuah partai politik yaitu Partai Keadilan (PK) pada tahun 1999. awalnya PKPU merupakan sebuah lembaga struktural di bawah PK sebagai Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkesos) dan bergerak dalam masalah sosial kemasyarakatan. Sejak adanya krisis melanda Indonesia, 1997, sejumlah anak-anak muda aktif melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia. Visi yang diusung adalah “menjadi salah satu institusi yang peduli terhadap kepentingan umat dengan pengelolaan yang amanah dan profesional di Indonesia”.

Misi yang dibangun PKPU adalah misi kemanusiaan meliputi tiga kegiatan⁷. *Pertama*, membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan. *Kedua*, menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (aghiya) dan fakir miskin (dhu’afa) melalui ZIS, wakaf dan dana kemanusiaan. *Ketiga*, menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya baik dalam maupun luar negeri.

3. Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika). Didirikan pada 1997, dengan misi membudayakan organisasi masyarakat sipil dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian LSM-LSM yang diperlukan untuk mengembangkan aliansi strategis, serta untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat terpencil. Program Yappika mencakup bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan kelembagaan, kredit kecil, hak asasi manusia, penerbitan dan advokasi. Dulunya Yappika bernama Yayasan Persahabatan Indonesia-Kanada (Yapika) yang didirikan pada tahun 1991,

kemudian mengubah namanya menjadi Yappika (dengan dua huruf ‘P’) setelah memutuskan untuk menyokong kegiatan advokasi. Yappika didukung oleh lembaga-lembaga Internasional terutama yang berasal dari Kanada dan telah memberikan dana kepada lebih dari 30 LSM dan 5 Jaringan LSM di Indonesia⁸.

Yayasan Tifa, didirikan pada Desember 2000, bertujuan mengembangkan “masyarakat terbuka” di Indonesia, yakni masyarakat yang menghargai pluralisme (keberagaman) dan menghormati hukum, keadilan dan kesetaraan. Visi Tifa adalah komunitas yang di dalamnya warga pemerintah dan dunia usaha mendukung hak-hak perorangan, wanita, minoritas, dan lain yang kurang diuntungkan. Tifa bertujuan memupuk solidaritas dan tata kelola yang baik. Untuk mencapai cita-cita, Tifa melakukan penguatan masyarakat sipil dan mendukung kegiatan dan inisiatif yang meningkatkan suara rakyat sehingga kepentingan mereka dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Tifa menerima dana awalnya dari *Open Society Institute* (OSI) New York⁹.

B. Legitimasi Filantropi Modern dan Sumber Dana

Asal dana dari luar negeri yang menjadi sandaran kebanyakan organisasi masyarakat sipil (dhi LSM) telah menyebabkan khalayak mempertanyakan keberlangsungan dan kredibilitas jangka panjangnya. Kebanyakan kegiatan mereka telah dan masih didanai oleh badan pemerintah maupun yayasan swasta luar negeri. Saat ini tercatat¹⁰ 40 badan dan yayasan seperti itu beroperasi dan membiayai proyek-proyek di Indonesia, dan beberapa organisasi lain baik langsung maupun tidak membiayai proyek dari luar Indonesia¹¹. Dua dari LSM disini bergantung hampir sepenuhnya pada dana dari luar negeri. Yappika sebagian besar didanai oleh CIDA (*Canadian International Development Assistant*), Tifa oleh *Open Society Institute*.

Masyarakat umum di Indonesia berasumsi bahwa organisasi yang melakukan dan mendukung program advokasi bergantung pada donor asing. Mereka mempertanyakan legitimasi organisasi organisasi seperti Yappika dan Tifa serta LSM-LSM lebih kecil yang mereka

dukung dan program-program mereka. Namun mereka menolak gagasan bahwa mereka didikte oleh penyumbang dana. Mereka melihat diri mereka sendiri melakukan negosiasi terus-menerus dengan para donor mereka, baik yang dari luar maupun asing. Mereka memang membutuhkan dana, tetapi mereka menerima dana hanya dari penyumbang yang telah atau bisa mengkoordinasi gagasan-gagasan dan rencana yang sejalan dengan program mereka.

Asal dana organisasi masyarakat sipil dari luar negeri tidak harus mengurangi keabsahan program advokasi, yang merupakan agenda dari Filantropi Modern.

Legitimasi dari dunia usaha untuk Filantropi modern agak bermasalah karena dunia usaha di Indonesia cenderung tidak mau mendukung kegiatan yang bisa dianggap politik apalagi yang anti pemerintah. Akan tetapi sebaliknya banyak dunia usaha yang saling tampil kelihatan manakala kegiatan pengumpulan dana tersebut disponsori oleh pemerintah apalagi oleh sang tokoh orde baru. Maka mereka akan berbondong-bondong antri untuk menampakkan diri bahwa mereka adalah penyokong utama program-program pemberdayaan sosial pemerintah, seperti misalnya para taipan dengan tekun menyimak dan menuruti wejangan serta fatwa sang tokoh di peternakan Tapos.

Kegiatan dominan yang mendapat respon dan dukungan dunia usaha adalah pelayanan sosial kegiatan keagamaan dan pendidikan. Perlu catatan kaki, bahwa dukungan untuk kegiatan agama yang mereka lakukan adalah kegiatan yang telah menjadi bagian dari kebudayaan setempat seperti perayaan hari besar agama dengan kegiatan kesenian, olahraga dan promosi sosialnya.

III. PEMBANGUNAN SOSIAL

Nama-nama yang dikutip disini adalah generasi muda Departemen Sosial, yang diharapkan kelak sebagai penerus kepemimpinan pembangunan sosial yang sekarang posisinya dalam jajaran struktural pada eselon III dan ada yang eselon I dimana disaat mereka menuliskan pikirannya masih dalam posisi pejabat eselon II, sekarang sudah menduduki jabatan eselon I dengan usia antara 40-50 tahun. Gagasan dan visi mereka terhimpun

dalam buku "Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial" yang diterbitkan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial pada tahun 2004.

Konsepsi tentang Pembangunan Sosial, dapat disebutkan bahwa mereka nyaris sama persepsinya dalam membedakan antara pembangunan sosial dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang rata-rata mengacu pada definisi dari United Nations atau referensi Barat.

Dr. Marjuki memberikan karakteristik pembangunan sosial menjadi 6 (enam) yaitu:

- a. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi
- b. Berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan dan ideologi masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan sosial di masyarakat
- c. Memunculkan berbagai alternatif kegiatan yang mempengaruhi perubahan sikap, relasi sosial dan kemajuan lembaga sosial
- d. Membutuhkan Intervensi
- e. Dicapai melalui berbagai strategi
- f. *Concern* dengan penduduk secara keseluruhan, karenanya pembangunan sosial lingkungannya universal.

Indikator-indikatornya adalah:

- a. Pendapatan dan Kemiskinan
- b. Pekerjaan, termasuk jaminan kerja
- c. Dukungan Sosial
- d. Kesehatan
- e. Kejahatan
- f. Pendidikan, dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Edy Suharto Ph.D ketika membahas kebijakan sosial pada pembangunan sosial juga memberikan pengertian yang sama ketika memasuki istilah sosial dalam pengertian sempit dan luas, dimana makna sempitnya kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sehingga suatu bagian atau bidang pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna susila dan kenakalan remaja. Demikian makna sosial dalam arti

sempit yang menjadi tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial di Indonesia dewasa ini.

Dalam pengertian yang luas pembangunan sosial diartikan sebagai sebuah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu pada kesempatan seminar Pembangunan Sosial di Balai Besar Kesos Yogyakarta, 5 Desember 2006 lalu, ada yang mengusulkan bahwa kabinet Indonesia yang akan datang perlu ditata ulang tentang Menteri Koordinator. Menurut forum, yang lebih tepat secara konseptual bukan Menko Kesra tetapi Menko Sosial dan dalam tatanan departemennya ada Departemen Kesejahteraan Rakyat.

Melalui perspektif profesi pekerjaan sosial, berkaitan dengan masalah sosial, Dr. Dwi Heru Sukoco M.Si, mendefinisikan sebagai masalah yang timbul dari berbagai sebab, baik faktor internal (pelaku) maupun faktor eksternal (lingkungan), sehingga masalah sosial bersifat kompleks mempunyai berbagai dimensi baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya dapat dideteksi secara *lintas sektor dan interdisipliner*.

Ada beberapa prinsip masalah sosial dalam pembangunan sosial, yaitu:

- a. Kompleksitas
- b. Komprehensif
- c. Interdisipliner, dan
- d. Berkesinambungan

Sementara itu Mu'man Nuryana Ph.D, menyoroti urgennya tentang *Social Capital* (Modal Sosial) bagi pembangunan sosial.

Dari hasil studinya, terbukti bahwa modal sosial berkonotasi positif pada kehidupan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga/masyarakat. Sebaliknya, hilangnya modal sosial dapat menimbulkan emosional *disorder* dan timbulnya kejahatan sosial.

Yang dimaksudkan modal sosial disini meliputi jaringan kerja (organisasi sosial), norma dan nilai-nilai serta kepercayaan yang memfasilitasi kepentingan bersama¹².

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Karena tujuan utama organisasi Filantropi adalah mendukung intervensi pembangunan sosial, maka merupakan pemangku kepentingan kunci dalam proses pembangunan sosial di beberapa negara, khususnya di Amerika dan Eropa dan ada tanda-tanda awal untuk di Indonesia.
2. Karena makalah ini bertujuan memberikan sumbangsih analisis praktek Filantropi dan mengeksplorasi cara organisasi filantropi dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan sosial melalui intervensi Filantropi mereka.
3. Organisasi Filantropi dapat memainkan sumbangsih terhadap perubahan sistemik yang diperlukan untuk masyarakat yang lebih berkeadilan sosial.

B. Rekomendasi

1. Bagi organisasi Filantropi Modern hendaknya mengembangkan pemahaman mendalam hubungan-hubungan *interpersonal, organisasional* dan *institusional* pada semua tingkat (makro dan mikro) dan antara segala sektor dengan analisa bagaimana mereka berhubungan dengan akar-akar penyebab masalah-masalah pembangunan sosial dan melancarkan perubahan.
2. Secara proaktif mencari pemberi hibah potensial dalam dan luar negeri dengan tetap memegang teguh kemandirian dan keadilan.
3. Secara proaktif menggunakan kekuatan mereka untuk "membuka pintu" bagi para penerima hibah dan memberikan fasilitas dialog antara tingkat *makro, meso*, dan *mikro* dan antara segala sektor.
4. Meningkatkan *transparansi* dan *akuntabilitas*, dengan lantang mengumumkan kepada siapa mereka harus akuntable.
5. Menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosial pada semua aspek operasi pembangunan *internal* dan *intervensi eksternal*.

DAFTAR PUSTAKA :

....., 2005, *Profil Muhammadiyah*, PP Muhammadiyah.

Charles S. Bamualim, Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, The Ford Foundation dan Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Edi Suharto, 2004, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial; Konsepsi dan Strategi*, Jakarta, Balatbangsos Departemen Sosial RI.

Jurnal Galang Volume I/tahun 2005

Thomas Silk, 1999, *Filantropi dan Hukum di Asia ; Tantangan Untuk Indonesia*, Jakarta, PT Fristi Pratama

Catatan Kaki:

- ¹ Zaim Saidi cs, "Filantropi Keadilan Sosial di Indonesia" dalam jurnal Galang Vol.1, 2005, 32.
- ² PP Muhammadiyah. Profil Muhammadiyah 2005, Yogyakarta, 2005
- ³ PIRAC, Investing in Ourselves Giving and Fund Raising in Indonesia, Jakarta, PIRAC 2000.
- ⁴ Rustam Ibrahim, "Perkembangan Civil Society di Indonesia", Jakarta, 29 Juli 2004.
- ⁵ Karlina Helmanita, "Mengelola Filantropi Islam", dalam Revitalisasi Filantropi Islam, the Ford Foundation, 2005, 87
- ⁶ Loc cit
- ⁷ Chaidar S. Bamualim, "PKPU dalam Revitalisasi", ibid, 175-192
- ⁸ Jurnal Galang, ibid, 37.
- ⁹ OSI didirikan oleh George Soros, yang dikenal sebagai spekulan valas, dan sebagai filantropis generasi mutakhir
- ¹⁰ Zaim Saidi, idem, 43
- ¹¹ LP3ES, Dictionary of Funding Agencies in Indonesia, Jakarta, LP3ES, 2001
- ¹² Lihat juga Dr. Robert Lawang, Kapital Sosial, UI 2005.

BIODATA PENULIS :

Chusnan Jusuf, lulusan S1 Filsafat UIN Yogyakarta, dan sekarang aktif sebagai Widyaiswara Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI dan aktif sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

INDEKS

A

Access cultural lag, 3
Aceh, 9
Act locally, 18
Adoption Theory, 4
Advokasi, ii
Ahwan, 47
Albert Fry, 33
Ali Wafa, 45
Amerika Serikat, 3, 34
Anthony H. Pascal, 55
Anthropos, 74
Arist Merdeka Sirait, 66
Association, 74
Attitude, 2
Australia, 3, 34
Autonomy, 4
Awareness, 5

B

Badung, 48
Bali, 10
Bambang Pudjianto, 18
Basic Competence, 2
Basic Needs, 56
Batak, 10
Beijing Rules, 65, 67, 69
Bengkulu, 12
Betke, 47
Blitar, 64, 67, 68, 70, 71
Blue-print, 21
Bone, 20, 23, 25, 28
Bottom up, 46
Bottom-up strategic, 7

C

Canadian International Development Assistant (CIDA), 77
Case Work, 27

Changing Acceleration, 1
Charitas, ii
Charity, 18, 74
Chicago, 47
Child Centered Community Development (CCCD), 65
Child Friendly, 67, 72
Children In Need Special Protection (CNSP), 66
Chusnan Jusuf, ii, 74
Civil Society, 19, 24, 74
Cluster, 8
Cognitive Anthropology, 21
Cognitive, 2
Coleman, 49
Community Organizing (CO), 3
Community Development, 2, 7, 8, 14
Community Members, 9
Community Organizer (CO), 3, 4, 9, 15
Concern, 78
Corporate Responsibility, 34
Corporate Social Responsibility, 34, 43

D

Dasawisma, 26, 27
Deli, 10
Direct approach, 34
Discontinuance, 5, 6

E

Edy Suharto, 78
Egalitarian, 34
Eicholz dan Rogers, 4, 5
Eisenberg, 35
Eka Santi, dkk, 47
Emergency Services, 61
Emic Approach, 7
Emphatize, 5
Environmental Capital, 45
Equilibrium, 1

Ethic Approach, 7

Ethnoscience, 21

Etyco-mythical-nucleus, 9

F

Feedback, 5

Filantropi, ii

Financial Capital, 45

Fishing Rod, 8

Focus Group Discussion (FGD), 54, 65, 70

Forceful and integrative community, 4

Ford Foundation, 75

Freidlander dan Khan, 52

Fukuyama, 45

Fund rising, 34

G

Goodwin Watson, 4

Grand theory, 2

Grant Making, 76

Grassroots, 19, 24

Group Work, 27

Guidance, 7

H

Haerry Spect, 55

Hardware, 57

Hartati, 35

Havighurst, 66

Heterogenitas, 19

Holistic Mapping, 12

Holistik, 2

Hongkong, 34

Human Basic Needs, 1

Human capital, 45

Human resources, 1

Hurlock, 66

I

I.N. Rasmianti, 49

Ignorance, 5, 7

Implement Regulations, 3

Indifference, 6

Indirect Approach, 34

Inklusif, 74

Innovation, 1, 4

Intelligence Quotient, 2

Irmayani, 32

J

Jambi, 11

James Coleman, 47

Jawa Timur, 11, 32, 36, 64

Jayapura, 10

Jepang, 34

Jufri Bulian Ababil, 66

K

Kalimantan Barat, 10

Kalimantan Selatan, 11

Kalimantan Tengah, 11

Kalimantan Timur, 11

Karitatif, 34, 38

Katalisator, 4

Kelompok Ekonomis Produktif (KUBE), 28

Koentjaraningrat, 8

Komunitas Adat Terpencil (KAT), i, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 16

Konsensus, 5

Korea, 34

Korten, 32

L

Lampung, 12

Legal Conditions, 3

Local Genius, 1, 9

Local Knowledge, 1

Local Potencies, 3

Local Wisdom, i, 1

M

M.R. Siahaan, 55

Made Suardike, 49

Madura, 12

- Malang, 70
 Malaysia, 10
 Maluku Selatan, 12
 Maluku Utara, 12
 Mapping, 15, 65
 Maslow, 55, 56
 Medan, 51, 53, 56
 Middle theory, 2
 Mochamad Syawie, 45
 Moore, 34
 Mu'man Nuryana, 35, 45, 46, 47, 79
- N**
Natural Resources, 1
Need Assesment, 9, 15
 Neil Gilbert, 55
 Nicholas Bennett, 7
 Nuryato, 66
 Nusa Tenggara Barat, 11
- O**
Open Society Institute (OSI), 77
Opponent, 5
Out-come, 35
- P**
 Padmiati, 47
Participatory Action Research (PAR), 2, 3, 4
Participation Learning and Action (PLA), 3
 Paul Ricover, 8
 Paulus Wirotomo, 21
 Pendapatan Asli Daerah (PAD), 36
 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
 Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), 49, 51
People Centered Development (PCD), 19, 20,
 22
Personal dan experimental, 7.
Personality Quotient, 2
Philanthropy, 74
Philos, 74
Physical Capital, 45
 Pidada, 35
- Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial
 (PMKS), 36, 37, 38, 41, 43
Political will, 38
Prestise, 56
Private trouble, 55
Problem Tree, 66
Programming Process Approach, 9
Proponent, 5
Provider, 1
 Psikomotorik, 2
Public Issues, 55
Public Trust, 75
Pull factor, 3
 Pulungan, 35
 Pusbang Tansosmas, 35
Push factor, 3
 Putnam, 45
- Q**
Quality Insurance, 2
- R**
 R. William Liddle, 8
Recipient, 2
 Rehabilitasi, 55
 Rejang Lebong, 12
Rejection, 4, 5
Residual approach, 18
Resistance, 4
 Resistensi, 4, 5
 Rushton (1980), 34
 Rusmin Tumanggor, 1
- S**
Scientific back-ground, 1
 Sears, Freedman dan Peplau (1985), 34
Security, 4
Self Sustaining Growth, 8
Self-determination, 4
Self-help, 4
Self-regulating, 4
 Selo Soemardjan, 21, 56

- Sembiring Ahmadi, 45
Seremonial, 38
Services, 74
Sibolga, 10
Simple life, 1
Sinar 132, 33
Skill, 2
Social Capital, 3, 34, 45, 47, 79
Social Movement Organization, 75
Social Physiological Needs, 56
Social Responsibility, 34
Social sustaining growth, 7
Soetarso, 52, 54, 55
Software, 57
Sparadley, 8
Spiritual Quotient, 2
Sporadis, 38
Start from behind, 7
Stimulance budget, 7
Substansil, 3
Sukoco, 55
Sulawesi Selatan, 10, 28
Sulawesi Tengah, 10
Sulawesi Tenggara, 10
Sulawesi Utara, 10
Sumatera Barat, 10
Sumatera Utara, 51, 53
Suparlan, 8
Surabaya, 32, 36, 37, 38, 39
Suradi, 52
Suryatmaja, 48
Suspended Judgement, 5, 7
Suyanto, 18, 46
SWOT (strength, weakness, opportunities, threat), 2, 15
- T
Tanete Riattang, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29
Tansosdus, 34
Technical procedure guideline, 3
- Temporer, 38
The community Sharing Ideas Theory, 4
The depths of misery, 3
The grand strategic of public policy, 3
The regency autonomous spirit, 3
The Self Help-Oriented Phylosophy, 7
Think globally, 18
Time Line, 65
Top Down Strategic, 7
Top Down, 46
Transect Walk, 65
Trust, 45, 48
Tulungagung, 70
Typology, 21
- U
Under development communities, 1
Universal culture, 1
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), 21, 54, 57, 59, 60, 61, 62
Utopis, 16
- V
Values, 4
- W
Wafa, 46, 47
Walter A. Fredlander, 55
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), i, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 33
World View, 1, 13
- Y
Yanuar Farida Wismayanti, 64
- Z
Zaltman, et. Al., 4, 6